

KEMENSOS PASTIKAN 100 LOKASI SEKOLAH RAKYAT SIAP BEROPERASI

Kementerian Sosial (Kemensos) mengumumkan ada 100 titik lokasi rintisan sekolah rakyat di seluruh Indonesia yang siap beroperasi tahun ajaran 2025/2026. Dari 100 titik ini, 63 titik akan memulai pengenalan kepada siswa pada 14 Juli 2025 dan sebanyak 37 titik akan dimulai di Agustus 2025.

“**J**adi Insya Allah awal Agustus target 100 Sekolah Rakyat sudah berjalan penuh,” ujar Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) usai mengikuti Rapat Tingkat Menteri (RTM) yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar di Jakarta, Selasa (8/7/2025).

Hadir dalam rapat tingkat menteri ini Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti serta perwakilan dari 17 kementerian/lembaga.

Gus Ipul menambahkan, dari 100 titik Sekolah Rakyat, sudah ada 9.700 siswa yang siap mengikuti pembelajaran angkatan pertama. Sebelum masuk asrama dan memulai kegiatan belajar mengajar, mereka akan menjalani pemeriksaan kesehatan. “Kalau ada yang sakit, sesuai arahan Presiden, harus dibantu sampai sembuh. Setelah itu baru belajar,” terangnya.

Selanjutnya para siswa, guru, maupun tenaga pendidik akan menjalani masa orientasi. Gus Ipul menyebut masa orientasi akan berlangsung lebih lama karena masih berstatus sekolah rintisan.

Dalam kesempatan yang sama, Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menegaskan rapat ini menjadi langkah penting mengevaluasi program penanggulangan kemiskinan nasional, baik menuju target 0% kemiskinan ekstrem pada 2026 maupun 4,5% angka kemiskinan pada 2029.

“Salah satu langkah konkret kita memotong rantai kemiskinan adalah melalui pendidikan, makanya Sekolah Rakyat ini harus kita dorong bersama-sama agar berjalan cepat dan efektif,” katanya. Ia juga menyebut pembangunan Sekolah Rakyat

permanen akan dimulai tahun ini, ditargetkan tiap kabupaten/kota nantinya memiliki minimal satu sekolah.

Gagasan Presiden Prabowo memberikan akses pendidikan gratis dan berkualitas melalui Sekolah Rakyat untuk memutus mata rantai kemiskinan, sejatinya berbasis data.

Kepala BPS Amalia menjelaskan, berdasarkan data di DTSEN per 25 Juni 2025, terdapat sekitar

422 ribu anak usia sekolah dari keluarga miskin ekstrem (desil 1) yang tidak sekolah atau putus sekolah.

“Total anak usia 7-18 tahun di Indonesia yang belum sekolah atau tidak sekolah lagi sekitar 4,1 juta orang, atau sekitar 7%. Ini jadi basis penting mengapa Sekolah Rakyat sangat tepat sasaran,” ungkapnya.

Amalia juga menekankan bahwa semakin tinggi pendidikan kepala keluarga, maka semakin tinggi juga tingkat kesejahteraan rumah tangga. “Mayoritas kepala keluarga miskin ekstrem hanya tamat SD atau bahkan tidak lulus SD. Jadi intervensi pendidikan seperti ini adalah jalan paling masuk akal memutus siklus kemiskinan,” jelasnya.

Gus Ipul pun optimistis Sekolah Rakyat akan jadi tonggak penting dalam memutus kemiskinan antargenerasi. “Mohon doa dan dukungan semua pihak supaya program ini berjalan lancar, hingga nanti dapat diresmikan langsung oleh Bapak Presiden,” pungkasnya.

Gus Ipul mengatakan program ini bertujuan menyediakan akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem, sebagai langkah strategis



Rapat Tingkat Menteri (RTM) yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar di Jakarta, Selasa (8/7/2025). (kemensos)

memutus rantai kemiskinan melalui Pendidikan sesuai arahan Presiden Prabowo.

“Sekolah Rakyat ini, seperti yang sering disampaikan Bapak Presiden Prabowo, adalah untuk keluarga yang kurang mampu,

keluarga yang punya potensi putra-putrinya putus sekolah, atau bahkan sudah putus sekolah,” kata Gus Ipul di Jakarta, Selasa (8/7/2025).

Sekolah Rakyat dirancang sebagai sekolah berasrama untuk jenjang SD, SMP, dan SMA. Seluruh siswa akan mengikuti pelajaran formal di siang hari, dan mendapat penguatan pendidikan karakter pada malam hari. Nilai-nilai agama, kepemimpinan, hingga keterampilan hidup menjadi bagian penting dari kurikulum.

Sebagai penunjang kurikulum, sekolah ini juga dirancang dengan fasilitas lengkap, termasuk asrama, laboratorium, fasilitas olahraga, dan gedung serbaguna. Seluruh biaya pendidikan, termasuk makan, tempat tinggal, buku, dan seragam,

akan ditanggung oleh pemerintah.

Pada tahap awal, sekolah akan memanfaatkan gedung-gedung milik pemerintah pusat dan daerah yang telah direnovasi. Ke depan, pemerintah akan membangun sekolah permanen di atas lahan minimal 8 hektare. Satu sekolah akan menampung hingga 1.000 siswa.

Sekolah Rakyat yang beroperasi pada Juli ini, menampung 395 rombongan belajar untuk jenjang SD, SMP, dan

SMA di 100 titik yang tersebar di 29 provinsi. Pulau Jawa menjadi wilayah terbanyak (48 lokasi), disusul Sumatra (22), Sulawesi (15), Bali-Nusa Tenggara, Kalimantan, dan Maluku (masing-masing 4), serta Papua (3 titik). Total kapasitas peserta didik pada tahap pertama ini mencapai 9.755 siswa.

Sementara itu, Kepala Kantor Komunikasi Presiden (PCO), Hasan Nasbi menegaskan kehadiran Sekolah Rakyat tidak akan menimbulkan tumpang tindih dengan sistem pendidikan reguler yang dijalankan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). Sekolah Rakyat dirancang sebagai strategi pelengkap untuk menjangkau kelompok masyarakat paling rentan.

“Kalau bicara soal pendidikan di Indonesia, bukan hanya Kemendikbudristek yang mengelola. Kementerian Agama juga punya sekolah. Dan, sebagian dari mereka juga pakai kurikulum dari Kemendikbudristek. Sama halnya dengan Sekolah Rakyat, kurikulumnya nanti mengacu pada kurikulum nasional,” kata Hasan dalam keterangannya, Senin, 8 Juli 2025.

Hasan menjelaskan sasaran Sekolah Rakyat adalah anak-anak dari keluarga yang masuk kategori Desil-1, yakni kelompok masyarakat termiskin. Kelompok ini merupakan anak-anak yang tidak mampu bersekolah karena keterbatasan biaya hidup meskipun sekolah sudah digratiskan.

“Jadi ini benar-benar anak-anak dari wilayah kemiskinan ekstrem. Mereka yang selama ini tidak terjangkau, akan diurus negara melalui Sekolah Rakyat. Anak-anak ini diasramakan, dikasih makan tiga kali sehari,” papar Hasan.

Hasan menyebut program ini tidak hanya menyasar pendidikan anak. Tetapi, menjadi bagian dari upaya pemerintah menghapus kemiskinan ekstrem secara menyeluruh.

“Ini program pemerataan. Ada pendidikan untuk anak-anaknya, ada program sosial untuk keluarganya. Karena menghapus kemiskinan ekstrem itu harus dimulai dari generasi penerus. Diberi pendidikan yang layak agar kelak mereka punya akses ke pekerjaan yang baik,” ujar dia. (rls/ist/lut)



“Salah satu langkah konkret kita memotong rantai kemiskinan adalah melalui pendidikan, makanya Sekolah Rakyat ini harus kita dorong bersama-sama agar berjalan cepat dan efektif,”

ABDUL MUHAIMIN ISKANDAR
Menko Pemberdayaan Masyarakat

DPR RI : RUU KUHP HARUS

MENJAWAB KEBUTUHAN MODERNISASI HUKUM

DPR RI mengharapkan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHP) segera bisa dibahas. Terlebih lagi, pemerintah melalui Menteri Hukum dan Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia, telah menyampaikan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) kepada Komisi III DPR RI di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta pada Selasa (8/7/2025).

RUU KUHP ini sebagai langkah signifikan menuju peradilan pidana terpadu yang profesional dan akuntabel, menjawab kebutuhan mendesak akan modernisasi hukum setelah KUHP yang lama berlaku lebih dari 44 tahun sejak tahun 1981.

Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir, menegaskan KUHP juga harus mampu menjawab tantangan dan dinamika hukum masa kini. "Kita ingin KUHP ini cepat selesai, karena KUHP ini hukum beracara yang menerapkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Jadi kita harapkan ini cepat selesai karena harus disinkronkan dengan KUHP yang baru, yang sudah disahkan DPR," ujar Adies di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (8/7/2025).

Menurutnya, sinkronisasi antara KUHP dan KUHP yang baru sangat krusial agar sistem peradilan pidana berjalan selaras dan tidak menimbulkan kekosongan atau tumpang tindih hukum.

"Selain mensinkronkan itu, juga menyesuaikan dengan kondisi keadaan sekarang, terkait dengan kasus-kasus hukum. Sekarang kan ada restorative justice segala macam, itu juga harus dimasukkan agar supaya aparat penegak hukum, baik kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan juga pengacara dan para pencari hukum dapat mendapatkan keadilan yang sebenar-benarnya," jelasnya.

Ia menekankan bahwa prinsip keadilan yang substantif harus menjadi roh dari KUHP yang baru. Adanya pendekatan keadilan restoratif dalam praktik penegakan hukum saat ini, menurut Adies, perlu



Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir usai Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (8/7/2025). (Parlementaria; Oji/Andri)

mendapatkan landasan hukum yang kuat dalam undang-undang.

Adies juga mengungkapkan alasan lain mengapa pembahasan KUHP perlu dipercepat. Ia menyebut bahwa ada dua rancangan undang-undang penting yang menunggu kejelasan posisi KUHP sebagai acuan dasar, yakni RUU Kepolisian dan RUU Perampasan Aset.

"Jadi kita harapkan ini cepat. Selain itu, kenapa kita minta cepat? Ada dua rancangan undang-undang juga yang menanti KUHP ini, antara lain RUU Kepolisian dan juga RUU Perampasan Aset," tegas politisi Partai Golkar itu.

Dengan mendorong percepatan pembahasan RUU KUHP, DPR RI berharap dapat menyediakan sistem hukum acara pidana yang tidak hanya modern dan relevan dengan perkembangan zaman, tetapi juga menjamin keadilan bagi seluruh pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana.

Sementara itu, Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokman mengatakan penyempurnaan KUHP secara komprehensif ini didasari oleh berbagai dinamika hukum dan sosial, termasuk perubahan undang-undang, konvensi internasional, putusan Mahkamah Konstitusi, serta modernisasi teknik dan sistem

pembuktian.

Habib mengatakan salah satu dorongan terbesar adalah ketidakmampuan KUHP lama dalam memberikan perlindungan memadai kepada warga negara dan kecenderungannya pada pemidanaan retributive sehingga harus menyesuaikan dengan tantangan saat ini.

"Kasus-kasus seperti Nenek Minah yang mencuri tiga biji kakao, pencurian kayu jati di Bojonegoro, atau pencurian sandal jepit, menunjukkan bagaimana KUHP yang berlaku saat ini mengharuskan proses hukum, padahal hati nurani menolak," demikian Habib mengilustrasikan kebutuhan akan keadilan restoratif sebagai solusi untuk kasus-kasus ringan.

Selain itu, Habib menjelaskan bahwa RUU KUHP juga berupaya mengatasi minimnya peran advokat dalam mendampingi warga negara yang berhadapan dengan hukum, serta maraknya intimidasi dan pelanggaran selama proses penegakan hukum. Oleh karena itu, pembaharuan ini diharapkan menjadikan aparat penegak hukum lebih terbuka, profesional, dan menghormati hak asasi manusia.

Secara keseluruhan, Habib merinci setidaknya ada 10 substansi pokok baru yang nantinya termuat dalam 334

pasal RUU KUHP. Substansi pokok baru tersebut yakni Penyesuaian dengan nilai-nilai KUHP baru yakni restoratif rehabilitatif dan restitutif, sebagaimana diketahui KUHP baru akan berlaku tanggal 1 Januari 2026; Penguatan hak tersangka terdakwa korban dan saksi; Penguatan peran advokat untuk menjamin keseimbangan dalam sistem peredaran pidana; Pengaturan mengenai perlindungan hak perempuan disabilitas dan hak kaum lanjut usia; Perbaikan pengaturan terkait mengenai mekanisme upaya paksa dan pelaksanaan kewenangan yang efektif efisien akuntabel berdasarkan prinsip perlindungan HAM dan due process of law.

Selanjutnya yaitu Pengaturan yang lebih komprehensif tentang upaya hukum; Penguatan terhadap asas filosofi hukum acara pidana yang didasarkan pada penghormatan hak asasi manusia yaitu dengan menguatkan prinsip check and balances maupun pengawasan berimbang; Penyesuaian dengan perkembangan hukum yang sesuai dengan Konvensi Anti Kekerasan, hak politik dan sosial (UNCAC) dan peraturan perundang-undangan terkait HAM perlindungan saksi dan korban dan perkembangan dalam mekanisme peradilan; Upaya modernisasi hukum acara yang lebih mengedepankan prinsip cepat sederhana transparan dan akuntabel termasuk pemanfaatan teknologi informasi; dan Revitalisasi hubungan antara penyidik dan penuntut umum melalui pola koordinasi yang lebih baik dan setara.

Sementara itu, Wakil Menteri Hukum Eddy Hiarij juga merinci 10 poin penguatan dalam RUU KUHP yaitu Penguatan hak tersangka terdakwa dan terpidana; Penguatan hak saksi, korban, perempuan, dan penyandang disabilitas; Memperjelas pengaturan upaya paksa dengan penambahan penetapan tersangka pemblokiran dan pengaturan mekanisme izin pada upaya paksa.

Selanjutnya ada Penguatan mekanisme dan memperluas substansi pra peradilan dengan penetapan tertangkap pemblokiran; Pengaturan mengenai mekanisme keadilan restoratif; ganti kerugian rehabilitasi restitusi dan kompensasi; Penguatan peran advokat; Pengaturan saksi mahkota (crown witness); Pengaturan pidana oleh korporasi; dan Pengaturan sistem informasi Peradilan Pidana terpadu berbasis teknologi informasi. (rls/lut)

"Selain mensinkronkan itu, juga menyesuaikan dengan kondisi keadaan sekarang, terkait dengan kasus-kasus hukum. Sekarang kan ada restorative justice segala macam, itu juga harus dimasukkan agar supaya aparat penegak hukum, baik kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan juga pengacara dan para pencari hukum dapat mendapatkan keadilan yang sebenar-benarnya,"

ADIES KADIR
Wakil Ketua DPR RI

KPK TETAPKAN 4 TERSANGKA KORUPSI GEDUNG PEMKAB LAMONGAN RP 151 M

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah menetapkan empat tersangka dalam kasus korupsi proyek pembangunan gedung Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lamongan, Jawa Timur yang bersumber dari APBD 2017-2019 senilai Rp 151 miliar.



Gedung Pemerintah Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. (Dok Pemkab Lamongan)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan, tersangka kasus dugaan korupsi terkait pembangunan gedung Pemerintah Kabupaten Lamongan tahun anggaran 2017-2019, berjumlah empat orang.

"Ada empat tersangka," ujar Plt Deputy Penindakan KPK Asep Guntur Rahayu kepada wartawan di Jakarta, Selasa (8/7/2025).

Asep mengatakan pihaknya belum bisa membeberkan identitas keempat tersangka tersebut.

Sebelumnya, Jubir KPK Budi Prasetyo menyatakan penyidik sudah menetapkan tersangka dalam kasus korupsi proyek pembangunan gedung Pemkab Lamongan senilai Rp 151 miliar. Tetapi dia juga tidak menyebut siapa saja tersangkanya.

"Nanti kami update untuk siapa saja tersangkanya, namun kami pastikan perkara tersebut KPK sudah menetapkan pihak-pihak tertentu sebagai tersangka," ujar Budi.

KPK diketahui kembali menyidik kasus korupsi proyek pembangunan gedung Pemkab Lamongan setelah mengendap sekitar 1 tahun 10 bulan.

Pada Senin (7/7/2025), KPK memeriksa lima saksi di lantai tujuh gedung Pemkab Lamongan. Sementara, hari ini, penyidik KPK melanjutkan pemeriksaan tujuh saksi dalam kasus tersebut.

Sebelumnya, pada September 2023, KPK juga sudah memeriksa beberapa pejabat Lamongan terkait kasus korupsi proyek senilai Rp 151 miliar itu.

7 Saksi Termasuk Ketua KONI Diperiksa

Sementara, pada Selasa (8/7/2025) KPK memanggil tujuh saksi. "Hari ini KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi dugaan TPK (Tindak Pidana Korupsi) terkait pembangunan gedung Pemkab Lamongan tahun anggaran 2017-

2019," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya.

Ketujuh saksi yang diperiksa adalah Mokh Sukiman selaku PPK/Kepala Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Lamongan; Naila Maharlika selaku Kepala Sub Bagian Keuangan; Heri Pranoto selaku Kepala DPKAD Kab Lamongan tahun 2017

sekalius Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Lamongan; dan Laili Indayati selaku Kabag Perencanaan dan Keuangan Setda Kabupaten Lamongan.

Kemudian, Muhammad Yanuar Marzuki selaku Komite Manajemen Proyek Pembangunan Gedung Kantor Pemkab Lamongan TA 2017-2019/Direktur CV Absolute; Ahmad Abdillah selaku Direktur PT Agung Pradana Putra; dan Herman Dwi Haryanto selaku General Manager Divisi Regional III di PT Brantas Abipraya 2015-2019.

"Pemeriksaan dilakukan di Kantor Pemkab Lamongan," ujarnya.

Meski demikian, KPK belum menyampaikan materi yang akan digali dari pemeriksaan saksi tersebut. Budi mengatakan, KPK kembali melanjutkan pengusutan perkara

tersebut berdasarkan bukti-bukti baru yang ditemukan penyidik. Dia mengatakan, penyidik sedang menelusuri pihak-pihak yang terlibat dalam kasus korupsi tersebut.

"Termasuk hasil-hasil dari tindak pidana korupsi tersebut, tentu juga harus dilacak, pihak-pihak mana saja yang kemudian menikmati hasil korupsinya," tuturnya.

Sebelumnya, pada 13 September 2023, tim penyidik KPK menggeledah kantor Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Lamongan dan Pendopo Rumah Dinas Bupati Lamongan. Dari penggeledahan itu, tim penyidik KPK mengamankan berkas dalam sejumlah koper.

Menurut Pelaksana Tugas (Plt) Deputy Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu, penggeledahan yang terjadi di rumah dinas Bupati Lamongan Yuhronur Efendi tersebut terkait dugaan korupsi pembangunan gedung. Adapun pelaksana proyek pembangunan tersebut adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Lamongan. (wid,rls,ant/dya)

Fakta Gedung Pemkab Lamongan yang Disorot KPK

- **Dibangun Sejak 2017, Habiskan Rp151 Miliar**
Gedung 7 lantai milik Pemkab Lamongan mulai dibangun pada 17 Agustus 2017, bertepatan dengan HUT ke-72 RI. Proyek ini didanai dari APBD senilai Rp151 miliar dan kini ditempati oleh Sekretariat Daerah, Bappeda, BKD, Diskominfo, serta Staf Ahli.
- **Proyek Molor, 5 Kali Perpanjangan Waktu**
Pembangunan sempat terkendala, dengan lima kali addendum perpanjangan waktu. Meski ditargetkan lebih cepat, proyek ini akhirnya rampung dalam waktu tiga tahun.
- **Dibangun Saat Bupati dan Ketua DPRD Adalah Ayah-Anak**
Pembangunan berlangsung di era Bupati Fadeli. Pada 2018, anaknya, Debby Kurniawan, menggantikan Kaharudin sebagai Ketua DPRD Lamongan melalui mekanisme PAW.
- **Diresmikan Saat Hari Pahlawan**
Gedung ini diresmikan oleh Bupati Fadeli pada 10 November 2019, bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan, melalui penandatanganan prasasti dan pemukulan gong.
- **Perawatan Gedung Dialokasikan Rp800 Juta**
Biaya perawatan gedung ini, termasuk Rumah Dinas Bupati, Wakil Bupati, Sekda, dan Pendopo Lokatantra, dialokasikan sebesar Rp800 juta dari APBD.

Libatkan ITB untuk Hitung Kerugian Negara

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) melibatkan Institut Teknologi Bandung (ITB) untuk menghitung kerugian keuangan negara dalam kasus dugaan korupsi terkait pembangunan gedung Pemerintah Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, tahun anggaran 2017-2019.

"Sedang cek fisik dengan ITB untuk hitung kerugian keuangan negara," ujar Pelaksana Tugas Deputy Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa (8/7/2025).

Selain ITB, Asep mengatakan bahwa KPK melibatkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk menghitung kerugian keuangan negara dalam kasus tersebut.

Pada kesempatan berbeda, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa KPK saat ini masih menghitung kerugian

keuangan negara untuk kasus di Lamongan itu.

"Saat ini perkara tersebut masih dilakukan finalisasi perhitungan kerugian negara oleh auditor negara," ujar Budi saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.

Sebelumnya, KPK pada 15 September 2023, mengumumkan memulai penyidikan kasus dugaan korupsi tersebut.

KPK juga mengatakan telah menetapkan tersangka dalam kasus tersebut, tetapi belum dapat mengumumkan identitasnya.

Menurut KPK, kerugian keuangan negara dalam kasus tersebut diperkirakan mencapai sekitar Rp151 miliar. Pada 7 Juli 2025, KPK melanjutkan penyidikan kasus tersebut dengan memanggil lima orang aparat sipil negara sebagai saksi. (wid,rls,ist/dya)

MENAG BICARA HAJI TAHUN DEPAN: POTENSI KUOTA TAK DIBATASI HINGGA JALUR LAUT

Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar mengungkapkan rencana pemerintah Arab Saudi untuk menghilangkan kuota haji. Tak hanya itu, terbuka juga peluang dibukanya jalur laut sebagai alternatif transportasi dalam pelaksanaan ibadah umrah dan haji.



Jamaah asal Sudan tiba di Pelabuhan Islam Jeddah pada Rabu jelang ibadah haji 2025. (SPA.Dok)

Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar mengatakan, pemerintah Arab Saudi kini lebih mementingkan pendekatan bisnis dalam pengelolaan haji, sehingga terus berencana mengembangkan infrastruktur haji

"Saudi Arabia ini sekarang pendekatannya juga sangat apa ya, katakanlah bisnis oriented ya, konsultannya juga adalah konsultan dari orang-orang yang terkenal dari Amerika dan ini juga menghitung betul bagaimana memungut dana sebesar-besarnya melalui potensi strategis dari potensi geografis yang dimiliki Saudi Arabia," ujar Nasaruddin dalam acara State of the Global Islamic Economy (SGIE) Report di Gedung Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, Selasa (8/7/2025).

"Karena itu juga musim haji yang akan datang itu juga tidak... kemungkinannya, tidak akan dibatasi," tegasnya.

Nasaruddin mengatakan, fokus perbaikan infrastruktur dan layanan haji yang akan digarap oleh Pemerintah Arab Saudi ialah di Mina, antara selama ini menjadi penyebab berbagai masalah pelaksanaan haji. Sedangkan fasilitas haji di Padang Arafah, Makkah tak bermasalah.

Ia menggambarkan Mina kerap menjadi perharian pemerintah Arab Saudi karena penuh sesak sehingga para jemaah haji harus memakai tenda untuk menjalankan rangkaian ibadahnya. Oleh sebab itu, Nasaruddin mengatakan nantinya Kerajaan Saudi akan melakukan pembangunan di kawasan Mina.

"Ada rencana dalam waktu tidak lama, Mina yang menjadi hambatan itu nanti akan ditingkat menjadi 8 lantai, tidak lagi pakai tenda. Kemudian juga, Mina itu nanti akan ada jalan layang," ungkap sang menteri.

Di lain sisi, kawasan Kabah dan Masjidil Haram, atau Baitullah ia sebut akan diperluas oleh Pemerintah Arab Saudi. Gunung-gunung di sekitarnya akan dipangkas untuk memperluas kapasitas.

"Gunung-gunung itu dipangkas kemudian sampai ke Jabal Omar, di

belakang itu mungkin ada satu kilo jaraknya antara kabah dengan dinding-dinding pagar Ka'bah," paparnya.

Karena itu, ia meyakini ke depan daftar tunggu itu akan diperpendek dengan cara membuka sebanyak-banyaknya peluang untuk bisa menunaikan ibadah haji. "Kenapa? Karena fasilitas Arafah-nya tidak ada masalah, tapi yang masalah itu adalah Mina. Di Mina itu nanti akan dibangun," tutur Nasruddin.

"Kemudian juga, Jamarat (tempat lempar jumrah) itu sudah ditingkat, mungkin nanti ditinggikan sampai 5 lantai. Kemudian juga, di Haram itu juga nanti masih akan ditambah Shafamarwah-nya sehingga dengan demikian jamaah haji dan umrah itu akan semakin banyak menampung jemaah pada masa itu," tutur

Nasaruddin.

Sebagaimana diketahui, pada 2024 kuota haji yang diberikan Pemerintah Arab Saudi untuk Indonesia sempat mencapai angka tertinggi, yakni 241 ribu orang. Terdiri dari 213 ribu jemaah reguler dan 27,6 ribu jamaah khusus.

Sementara itu, pada tahun ini kuotanya berkurang menjadi 221 ribu jamaah. Rinciannya, ada 203.320 jamaah reguler dan 17.680 merupakan jamaah haji khusus.

Menag Nasaruddin Umar juga membuka peluang kemungkinan dibukanya jalur laut sebagai alternatif transportasi dalam pelaksanaan ibadah umrah dan haji. Nasaruddin menyebut, inisiatif ini sedang didiskusikan oleh Pemerintah RI dengan otoritas Arab Saudi.

3 Jamaah RI Masih Hilang, Pemerintah Sisir RS Makkah-Jeddah

DIREKTUR Haji Luar Negeri Kementerian Agama (Kemenag) Muchlis Hanafi menyampaikan 3 jemaah haji RI masih hilang di Arab Saudi. Pencarian terhadap ketiganya masih berlangsung.

"Sampai detik ini masih belum ada titik terang. Kemarin pihak KJRI juga sweeping lagi masih belum ada info valid," kata Direktur Haji Luar Negeri Kementerian Agama (Kemenag) Muchlis Hanafi, Selasa (8/7/2025).

Muchlis menuturkan lusa pencarian akan dilakukan di RS Makkah dan Jeddah. Dia mengatakan dua anggota jamaah hilang sebelum armuzna, sedangkan satu jamaah sesudahnya.

"Tanggal 10 pagi, sebelum akhir operasional PPIH AS, bidang perlindungan jamaah PPIH AS akan

kunjungi lagi RS Makkah dan Jeddah," ujarnya.

"Dua orang dinyatakan hilang sebelum Armuzna, dan sudah dibadalkan. Satu org lagi setelah Armuzna," lanjutnya.

Sebelumnya, Kepala Bidang Pelindungan Jamaah Kolonel Harun Al Rasyid saat dihubungi, Rabu (2/7/2025), menyebutkan tiga orang jemaah yang hilang saat melaksanakan ibadah haji memiliki riwayat demensia. PPIH masih mencari keberadaan para korban.

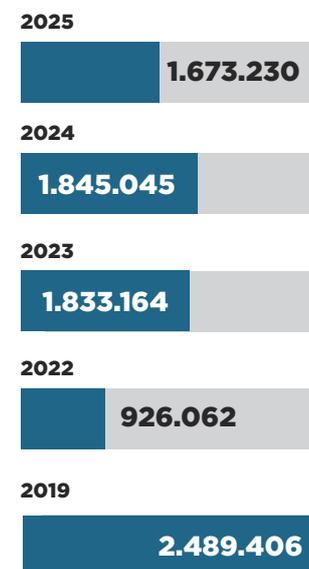
"Menurut pelapor ketiganya memiliki riwayat demensia dan sudah beberapa kali juga hilang namun masih diketemukan," kata Harun.

Dia memerinci mereka yang hilang adalah Nurimah (80), jamaah kelompok terbang 19 Embarkasi

"Digagas ke depan, kami kira sangat prospektif memperkenalkan umrah dan haji melalui kapal laut. Kami juga kemarin berbicara dengan sejumlah pejabat di Saudi Arabia," katanya.

Nasaruddin mengatakan, jika infrastruktur pendukung seperti pelabuhan dan sarana transportasi laut telah tersedia, maka peluang ini dapat terlaksana. "Kalau memang itu persyaratannya terpenuhi, peluangnya sudah dibangun sekarang. Itu terbuka," ucap dia. (wid,rls,kcm/dya)

DATA JUMLAH JAMAAH HAJI



Palembang. Nurimah dilaporkan pergi dari hotel 614 dan tak kembali lagi sejak 28 Mei atau dua hari setelah tiba di Makkah.

Selain itu, ada Sukardi (67), jamaah kelompok terbang 79 Embarkasi Surabaya. Sukardi dilaporkan pergi dari hotel 813 dan tak kembali lagi sejak 29 Mei atau dua hari setelah tiba di Makkah.

Terakhir, Hasbulah (73), jamaah kelompok terbang 7 Embarkasi Banjarmasin. Hasbullah dilaporkan meninggalkan hotel 709 pada Selasa (17/6) dini hari.

Harun menjelaskan, pihaknya telah membentuk dua tim untuk mencari ketiga jemaah. Proses pencarian ini dilakukan di berbagai tempat, termasuk sejumlah rumah sakit (RS) sekitar Makkah dan Jeddah. (wid,ant,rls/dya)

Jumlah UMKM Melejit, Pemkot Batu Bakal Bikin Mal Khusus di Sekitar Alun-alun

BATU - Pemerintah Kota (Pemkot) Batu mulai menyiapkan rencana pembangunan Mal Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Salah satu lokasi yang dipertimbangkan adalah kawasan sekitar Alun-alun Kota Batu.

Wali Kota Batu, Nurochman, menyampaikan saat ini pihaknya tengah menyiapkan desain Mal UMKM, sebagai bagian awal proyek tersebut. "Ya (progres rencana pembangunan) terus berlanjut. Sedang kami persiapkan desainnya," ujar Nurochman, dikutip pada Selasa (8/7/2025).

Diketahui jumlah UMKM di Kota Batu cukup melejit. Berdasarkan data Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan (Diskumperindag), pertumbuhan sektor UMKM di Kota Batu pada tahun 2023 mencapai 28 persen. Jumlah UMKM tercatat meningkat dari 5.900 unit menjadi 7.552 unit pada tahun 2024.

Meski belum mengungkapkan secara pasti lokasi pembangunan, Cak Nur, sapaannya, menyebut sejumlah tempat telah masuk dalam kajian awal. Salah satu lokasi yang dipertimbangkan adalah kawasan sekitar

Alun-alun Kota Batu.

Kendati demikian, ditegaskannya, keputusan final mengenai lokasi belum ditentukan. "Kalau lokasi masih ini, lah ya, saya belum berani ngomong lokasi dulu. Nanti opsinya ada di beberapa tempat. Bisa di sekitaran Alun-alun," ungkapnya.

Cak Nur menjelaskan, Mal UMKM akan difokuskan sebagai ruang display bagi produk-produk unggulan pelaku usaha mikro hingga menengah di Kota Batu. Disebutkannya, kualitas produk UMKM di wilayahnya cukup beragam dan potensial untuk dipromosikan secara lebih luas.

"Di Kota Batu ini kan banyak UMKM yang punya kualitas bagus. Maka ya semuanya produknya itu yang akan kami tampilkan. Kami display di Mal UMKM nanti," katanya.

Namun, menurutnya pelaksanaan pembangunan fisik Mal UMKM dipastikan belum akan direalisasikan dalam tahun ini. Cak Nur menegaskan, saat ini tahapan masih pada persiapan perencanaan dan desain.

"Belum. Belum kalau tahun ini. Kan perencanaannya belum, masih disiapkan," lanjutnya.

Di luar pembangunan Mal UMKM,

Pemkot Batu juga m e m b u k a k e m u n g k i n a n pemanfaatan bedak-bedak kosong di Pasar Induk Among Tani sebagai tempat penjualan produk UMKM. Meski bukan bagian dari proyek Mal UMKM, langkah ini tetap bertujuan mendukung pelaku usaha kecil dalam memperluas akses pasar.

"Bisa jadi nanti memanfaatkan di Pasar Induk Among Tani, itu kita isi bedak-bedak yang kosong, bisa. Tetapi ini bukan Mal UMKM-nya, tetapi untuk menampung produk UMKM-nya," jelasnya.

Untuk diketahui, gagasan pendirian Mal UMKM telah dimasukkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batu tahun 2025-2030. Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan



(Musrenbang) awal Maret 2025 lalu.

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan (Diskumperindag) Kota Batu, Aries Setiawan, menyebut pendirian Mal UMKM merupakan bentuk komitmen kepala daerah. Dalam memperkuat daya tahan UMKM di tengah dinamika ekonomi yang tidak menentu. (Santi/Dya)

Pemkot Malang Cari Solusi soal Kuota SMP Negeri Tak Cukup Tampung Lulusan SD



(Ilustrasi) Salah satu SMP Negeri di Kota Malang. (Santi/Lentera)

MALANG - Kuota penerimaan siswa baru di SMP negeri Kota Malang tahun ini tidak mampu menampung seluruh lulusan SD. Pemerintah Kota (Pemkot) Malang akan melakukan evaluasi dan mencari solusi. Salah satunya berencana mengajukan masukan ke pemerintah pusat terkait kebijakan penetapan kuota yang dinilai belum

sesuai dengan kebutuhan daerah.

"Karena kuotanya sekarang kan sudah ditetapkan oleh pusat, beda seperti ketentuan saat tahun sebelumnya. Kita tidak boleh ada penambahan. Ini kan program baru, kebijakan baru. Tetapi nanti kami akan memberikan masukan terkait hal tersebut," ujar Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, Selasa (8/7/2025).

Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Malang, jumlah lulusan SD tahun ini mencapai 14.354 siswa. Sementara total daya tampung untuk jenjang SMP hanya 12.352 kursi, terdiri dari 7.424 kursi di SMP negeri dan 4.928 kursi di SMP swasta.

Artinya, terdapat selisih lebih dari 2.000 siswa yang berpotensi tidak

tertampung di sekolah negeri.

Dalam kesempatannya, Wahyu juga menyampaikan, opsi penambahan sekolah memang memungkinkan, namun tidak bisa dilakukan secara instan. Dibutuhkan kajian menyeluruh sebelum memutuskan untuk membangun atau menambah sekolah baru.

"Penambahan sekolah juga ada regulasinya. Tidak bisa kita ujug-ujug nambah sekolah, harus ada kajiannya dulu. Nanti juga akan kami lakukan itu," imbuah Wahyu.

Di sisi lain, Ketua DPRD Kota Malang, Amithiya Ratnanggani Sirraduhita, turut menyoroti persoalan ketimpangan antara jumlah lulusan dan daya tampung SMP negeri. Ia mengingatkan, solusi jangka pendek yang bisa dijalankan adalah penguatan sinergi dengan sekolah swasta melalui sistem penerimaan murid bersama.

"Ketika saya menjadi Ketua Komisi D, sudah pernah saya sampaikan rekomendasi soal PPDB, yang sekarang Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) bersama. Jadi bersama,

itu menggandeng sekolah-sekolah swasta untuk membantu mendistribusikan dan menyeimbangkan kualitas," kata Amithiya.

Disebutnya, pada tahun ini SPMB sudah mulai melibatkan beberapa sekolah swasta. Hal ini dinilai dapat menjadi salah satu alternatif untuk mengatasi keterbatasan kuota di sekolah negeri.

"Tapi memang tidak serta-merta menjadi pilihan dari masyarakat, karena harus menyeimbangkan kualitas dulu itu tadi. Saya berharap ini menjadi alternatif baik untuk mendistribusikan murid-murid," tambahnya.

Politisi PDI-Perjuangan ini juga mengingatkan, upaya menguatkan peran sekolah swasta harus dibarengi dengan komitmen pemerintah dalam hal dukungan fasilitas.

Menurutnya, Pemkot Malang perlu menyiapkan anggaran untuk meningkatkan sarana dan prasarana di sekolah swasta agar kualitas setara dengan sekolah negeri. (Santi/Dya)

Dugaan Deal Diam-diam Trump-Netanyahu

GENCATAN SENJATA, RELOKASI WARGA GAZA

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bertemu Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump di Gedung Putih, Senin (7/7/2025) waktu setempat. Pertemuan ini berlangsung di tengah upaya gencatan senjata antara Israel dan Hamas, serta isu kontroversial relokasi warga Palestina dari Jalur Gaza.

T Trump menyampaikan bahwa AS akan mengadakan pembicaraan dengan Iran dalam waktu dekat. Ia juga mengisyaratkan adanya kemajuan dalam rencana pemindahan warga Gaza ke negara-negara tetangga, meski menuai kritik tajam dari komunitas internasional.

"Kami telah mendapatkan kerja sama hebat dari negara-negara sekitar. Jadi sesuatu yang baik akan terjadi," kata Trump dalam pertemuan dengan Netanyahu, seperti dikutip dari pernyataannya kepada wartawan, seperti dikutip Reuters pada Selasa (8/7/2025).

Netanyahu menambahkan bahwa Israel dan AS sedang berupaya mencari negara yang bersedia menerima warga Gaza.

"Jika mereka ingin tinggal, mereka bisa tinggal. Tapi jika ingin pergi, mereka harus bisa pergi," ujar Netanyahu. "Kami hampir menemukan beberapa negara yang siap mewujudkan hal ini."

Sebelumnya, Trump menggagas transformasi Gaza menjadi kawasan wisata yang disebutnya "Riviera Timur Tengah". Namun, gagasan ini dikritik warga Gaza dan organisasi HAM sebagai bentuk "pembersihan etnis".

Kedatangan Netanyahu ke Washington bertepatan dengan perundingan tidak langsung antara Israel dan Hamas di Doha, Qatar, yang dimediasi AS untuk mengamankan gencatan senjata dan kesepakatan pembebasan sandera. Trump mengklaim negosiasi tersebut bisa menghasilkan kesepakatan dalam

pekan ini.

"Saya pikir kita sedang sangat dekat," kata Trump soal gencatan senjata Gaza.

Kepala Utusan Timur Tengah AS, Steve Witkoff, dijadwalkan terbang ke Doha dalam pekan ini untuk bergabung dalam putaran pembicaraan lanjutan. Ia sebelumnya menyusun proposal gencatan senjata selama 60 hari sebagai kerangka kesepakatan.

Namun, kemajuan negosiasi masih terkendala. Sumber Palestina menyebut hambatan utama adalah penolakan Israel atas masuknya bantuan kemanusiaan ke Gaza secara aman dan bebas. Israel bersikeras mengontrol bantuan agar tidak jatuh ke tangan militan.

Di sisi lain, Trump juga menyatakan keterbukaan untuk mencabut sanksi terhadap Iran. Presiden Iran Masoud Pezeshkian juga menyatakan kesiapannya menyelesaikan perbedaan dengan AS lewat dialog.

"Saya ingin sekali bisa mencabut



Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu (Kanan) menyerahkan surat kepada Presiden AS Donald Trump saat mereka bertemu di Ruang Biru Gedung Putih di Washington, DC, Senin (7/7/2025) waktu setempat. (AFP)

sanksi tersebut pada waktu yang tepat," katanya.

Pertemuan ini menjadi kali ketiga Trump dan Netanyahu bertatap muka sejak Trump kembali menjabat pada Januari lalu. Pertemuan dilakukan secara pribadi di Ruang Biru Gedung Putih, bukan di Ruang Oval seperti lazimnya pertemuan resmi.

Sementara itu, ratusan pengunjung rasa berkumpul di luar Gedung Putih. Mereka membawa spanduk bertuliskan "Hentikan Persenjataan Israel" dan menyerukan penangkapan Netanyahu, merujuk pada surat perintah dari Pengadilan Kriminal Internasional atas dugaan kejahatan perang di Gaza. (Reuters, ist/dya)

Hasil Pertemuan Trump-Netanyahu

- Gencatan Senjata Gaza:** Trump dan Netanyahu optimistis gencatan senjata segera tercapai. AS menegaskan perannya sebagai mediator dalam pembicaraan Israel-Hamas di Doha.
- Relokasi Warga Gaza:** Israel dan AS membahas relokasi sukarela warga Gaza ke negara ketiga. Trump menyebut adanya dukungan regional, meski dikritik sebagai bentuk "pembersihan etnis."
- Hubungan AS-Iran:** Trump mengumumkan rencana pembicaraan dengan Iran dan membuka peluang pencabutan sanksi demi meredakan konflik regional.
- Dorongan Perdamaian:** Trump menegaskan pentingnya segera mengakhiri perang. Netanyahu me-nyambut dorongan itu untuk memper-cepat negosiasi.
- Proposal Gencatan Senjata AS:**
 - Pembebasan sandera bertahap
 - Penarikan pasukan Israel
 - Jalur bantuan kemanusiaan
 - Dialog permanen untuk akhiri perang
- Situasi Politik Israel:** Netanyahu ditekan kelompok garis keras, namun publik mulai lelah dengan perang—gencatan senjata jadi opsi realistis.
- Nominasi Nobel:** Netanyahu secara resmi mencalonkan Trump untuk Hadiah Nobel Perdamaian atas peran mediasi AS.
- Protes Internasional:** Pertemuan diwarnai aksi demo di luar Gedung Putih, mengancam kebijakan Israel dan menuntut penangkapan Netanyahu.



PM Israel Calonkan Presiden AS Raih Nobel Perdamaian

PERDANA Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, menyatakan bahwa dirinya telah mencalonkan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, sebagai penerima Hadiah Nobel Perdamaian. Ia mengatakan telah mengirimkan surat pencalonan tersebut kepada Komite Nobel.

"Ia tengah menciptakan perdamaian saat kita berbicara, dari satu negara ke negara lain, dari satu kawasan ke kawasan lain," kata Netanyahu saat makan malam bersama Trump di Gedung Putih pada Senin (7/7/2025), seperti dilansir AFP, Selasa (8/7/2025).

Trump sebelumnya telah beberapa kali dinominasikan untuk Hadiah Nobel Perdamaian oleh para pendukungnya dan sejumlah anggota parlemen dari berbagai negara. Ia juga pernah menyampaikan kekecewaannya karena belum pernah memenangkan penghargaan prestisius tersebut.

Mantan Presiden dari Partai Republik ini sempat menyebut dirinya layak mendapat Nobel atas perannya dalam meredakan ketegangan antara India dan Pakistan, serta dalam memediasi pembicaraan antara Serbia dan Kosovo.

Trump juga mengklaim pantas diapresiasi karena ikut menjaga stabilitas antara Mesir dan Ethiopia, serta menjadi arsitek dari Perjanjian Abraham—kesepakatan normalisasi hubungan diplomatik antara Israel dan beberapa negara Arab.

Kini, saat kembali mencalonkan diri dalam pemilu presiden AS 2024, Trump mengampanyekan dirinya sebagai "pembawa perdamaian", yang diyakini mampu segera mengakhiri konflik di Ukraina dan Gaza jika terpilih kembali. Meski demikian, kedua konflik tersebut masih berlangsung hingga kini. (AFP, ist/dya)

Bahaya Tersembunyi Mikroplastik dalam Produk Harian

Sesuai dengan pengertiannya, mikroplastik adalah partikel plastik berukuran sangat kecil—umumnya kurang dari 5 milimeter. Partikel ini dapat terbentuk dari penguraian plastik berukuran besar atau berasal dari residu berbagai produk yang digunakan manusia, seperti kosmetik dan bahan pembersih.

Walau berukuran sangat kecil dan nyaris tak tampak oleh mata telanjang, mikroplastik telah menyebar luas dan mencemari berbagai aspek kehidupan. Partikel ini dapat ditemukan di mana-mana—mulai dari laut dan sungai, hingga udara, tanah, bahkan masuk ke dalam makanan serta air minum yang kita konsumsi sehari-hari.

Proses degradasi plastik yang lambat menyebabkan mikroplastik terakumulasi dalam jumlah yang sangat besar di lingkungan sehingga menciptakan ancaman jangka panjang yang belum sepenuhnya kita pahami.

Selain dampaknya pada ekosistem, mikroplastik kini menjadi perhatian utama dalam bidang kesehatan, karena partikel-partikel plastik ini berpotensi masuk ke dalam tubuh manusia, membawa serta bahan kimia berbahaya yang dapat mengganggu fungsi tubuh kita.

Meskipun dampaknya belum sepenuhnya dipahami, sejumlah penelitian menunjukkan bahwa paparan mikroplastik dapat menimbulkan berbagai masalah kesehatan, yang kini semakin menjadi fokus utama ilmuwan dan organisasi kesehatan di seluruh dunia. Dengan begitu, berikut ini

adalah dampak mikroplastik yang cukup berbahaya bagi kesehatan.

Kontaminasi Makanan dan Air

Mikroplastik sering kali ditemukan dalam makanan laut, seperti ikan, kerang, dan makanan laut lainnya, yang mengonsumsi partikel plastik dari lingkungan mereka. Selain itu, mikroplastik juga dapat masuk ke dalam air minum yang kita konsumsi sehari-hari. Ketika mikroplastik masuk ke dalam tubuh melalui konsumsi makanan atau air, mereka bisa mengendap dalam organ tubuh dan membawa serta bahan kimia berbahaya.

Gangguan Endokrin

Bahan kimia yang terkandung dalam mikroplastik, seperti bisphenol A (BPA) dan phthalates, diketahui dapat mengganggu sistem endokrin tubuh. Sistem endokrin bertanggung jawab untuk mengatur hormon dalam tubuh yang mengontrol berbagai proses biologis, seperti pertumbuhan, metabolisme, dan reproduksi. Paparan jangka panjang terhadap bahan kimia ini bisa memengaruhi keseimbangan hormon dan menyebabkan gangguan pada fungsi tubuh.

Penurunan Kualitas Sistem Imun

Paparan mikroplastik dalam jangka panjang dapat memengaruhi sistem imun manusia dengan cara

meningkatkan peradangan di dalam tubuh. Penelitian menunjukkan bahwa partikel mikroplastik yang masuk ke dalam tubuh dapat memicu respons inflamasi yang tidak normal, memengaruhi keseimbangan sistem kekebalan, dan bahkan memperparah kondisi medis yang sudah ada.

Jika sistem imun terus-menerus terpapar dan terganggu oleh mikroplastik, kemampuan tubuh untuk melawan infeksi dan penyakit pun akan menurun. Hal ini membuat tubuh menjadi lebih rentan terhadap berbagai gangguan kesehatan, termasuk penyakit kronis seperti autoimun, alergi, atau infeksi berulang.

Risiko Kanker

Beberapa jenis mikroplastik mengandung bahan kimia berbahaya yang bersifat karsinogenik (penyebab kanker). Ketika mikroplastik masuk ke dalam tubuh, bahan kimia ini dapat bersentuhan dengan sel tubuh dan menyebabkan kerusakan atau mutasi genetik yang berpotensi berkembang menjadi kanker.⁵

Risiko ini, meskipun masih dalam penelitian lebih lanjut, telah menarik perhatian para ahli kesehatan global, karena potensi mikroplastik untuk menyebabkan berbagai jenis kanker, terutama kanker hati.

Gangguan pada Sistem Pernafasan

Paparan mikroplastik melalui udara dapat terjadi terutama dalam bentuk debu plastik yang tersebar di lingkungan. Partikel-partikel

kecil ini dapat terhirup oleh manusia, yang dapat menyebabkan iritasi pada saluran pernapasan. Akumulasi mikroplastik dalam paru-paru dapat menyebabkan gangguan pernapasan, termasuk bronkitis, asma, dan penyakit paru-paru kronis.

Penurunan Kesehatan Reproduksi

Mikroplastik mengandung bahan kimia yang dapat memengaruhi sistem reproduksi manusia. Terutama pada wanita dan pria, paparan terhadap bahan kimia yang terkandung dalam mikroplastik dapat menyebabkan gangguan pada kesuburan.

Pada pria, bahan kimia ini bisa mengurangi jumlah sperma dan kualitasnya, sedangkan pada wanita, mikroplastik dapat mempengaruhi siklus menstruasi dan keseimbangan hormon. Dalam jangka panjang, ini dapat menyebabkan masalah kesuburan yang dapat sulit untuk diatasi.

Iritasi Kulit

Paparan mikroplastik pada kulit dapat terjadi melalui berbagai produk sehari-hari seperti deterjen, sabun, kosmetik, hingga pakaian yang mengandung partikel mikroplastik. Meski tak selalu terlihat, partikel-partikel kecil ini bisa menempel di kulit dan menimbulkan dampak kesehatan yang serius, terutama bagi individu dengan kondisi kulit sensitif atau alergi.

Partikel mikroplastik dapat membawa serta bahan kimia berbahaya yang memicu reaksi peradangan pada kulit. Akibatnya, kulit bisa mengalami iritasi, kemerahan, dan gatal, (nei,ist/dya)



Studi: Otak Psikopat Berbeda dari Orang Normal

Sebuah penelitian terbaru menemukan bahwa struktur otak psikopat berbeda dari otak manusia pada umumnya. Hasil ini memberikan pemahaman baru tentang sisi gelap kepribadian, khususnya dalam mengupas salah satu elemen dari yang dikenal sebagai "dark triad".

Diagnosis psikopat kerap dianggap sebagai salah satu prediktor paling kuat terhadap perilaku kekerasan yang berulang. Melalui penggunaan teknologi pencitraan otak canggih dan atlas otak Julich-Brain yang dapat diakses publik, tim peneliti dari sejumlah institusi di Jerman serta University of Pennsylvania berhasil menemukan adanya perubahan struktur pada jaringan otak individu yang memiliki karakteristik psikopatik.

Penelitian ini merupakan langkah penting dalam memahami dasar neurobiologis dari agresi dan perilaku antisosial.

Dalam studi ini, para peneliti menganalisis data MRI dari 39 pria dewasa yang telah didiagnosis sebagai psikopat, dan membandingkannya dengan kelompok kontrol. Hasil riset menunjukkan adanya hubungan yang mencolok antara kecenderungan antisosial dan struktur tertentu di otak.

Dengan menggunakan alat diagnostik bernama Psychopathy Check-List, tim menemukan skor yang lebih tinggi pada kategori "gaya hidup dan perilaku antisosial" berkaitan dengan pengecilan volume di beberapa area otak. Volume yang lebih kecil ini ditemukan di berbagai area, termasuk basal ganglia yang berperan dalam kontrol gerakan dan

pembelajaran serta thalamus, yang berfungsi sebagai pusat penghubung informasi sensorik.

Penurunan volume juga terdeteksi di bagian batang otak dan otak kecil (cerebellum), bagian penting dalam mengatur gerakan dan koordinasi. Selain itu, wilayah seperti korteks orbitofrontal dan insula yang berkaitan erat dengan regulasi emosi, pengambilan keputusan, dan perilaku sosial, juga mengalami penyusutan.

Hal ini menunjukkan bagian otak yang berperan dalam pengendalian perilaku mungkin tidak berfungsi optimal pada individu dengan sifat psikopatik.

Menariknya, kaitan antara struktur otak dan sifat psikopatik yang bersifat interpersonal-emosional seperti kecenderungan berbohong secara patologis dan kurangnya empati, ternyata tidak terlalu konsisten. Artinya, gangguan struktur otak lebih jelas terhubung dengan perilaku antisosial ketimbang ciri-ciri emosional atau manipulatif.

Tak hanya itu, hasil perbandingan kelompok juga menunjukkan adanya penurunan volume otak secara keseluruhan pada kelompok psikopat dibandingkan dengan kelompok kontrol.

Perbedaan yang paling mencolok dan terlokalisasi ditemukan di bagian subikulum kanan, yaitu bagian dari hipokampus yang berkaitan erat dengan fungsi memori. Temuan ini mengarah pada kesimpulan bahwa kemungkinan besar terdapat gangguan perkembangan otak yang meluas pada individu psikopatik.

Menurut para peneliti, ini mengindikasikan adanya hubungan neurobiologis yang kuat antara

perilaku antisosial dan berkurangnya volume otak di berbagai wilayah penting.

Meski hasil penelitian ini sangat signifikan, para ilmuwan juga mengakui adanya keterbatasan. Misalnya, data MRI dikumpulkan menggunakan berbagai jenis pemindai di lokasi berbeda, meski sudah disesuaikan secara statistik. Selain itu, tidak semua peserta penelitian memiliki tingkat kecerdasan atau riwayat penggunaan zat yang sama, yang bisa saja memengaruhi hasil

perbandingan.

Meskipun begitu, studi ini dianggap sebagai kemajuan besar dalam memahami faktor neurobiologis yang berkaitan dengan agresi dan perilaku kekerasan. Ke depan, penelitian lanjutan diharapkan dapat menjawab pertanyaan penting lainnya, termasuk soal apakah perbedaan struktur otak ini bersifat genetik, atau terbentuk akibat pengaruh lingkungan? (nei,ist/dya)



HARIAN
LENTERA
Inspirasi Perubahan **TODAY**

HARIAN "LENTERA TODAY"
PIMPINAN PERUSAHAAN TARMUJI TALMACSI
OMBUDSMAN SUKARJITO (ID Sertifikasi 14319)
PENANGGUNG JAWAB ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)
PIMPINAN REDAKSI ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)
REDAKTUR PELAKSANA AGUSTINA WIDYAWATI (ID Sertifikasi 2567)
REDAKTUR LUTFIYU HANDI, NEISKA OLIVIANA (CO)

KORAN DIGITAL LENTERA TODAY
Terbit Senin - Jumat (12 Halaman)
download edisi digital pada web
www.lenteratoday.com
VERIFIKASI FAKTUAL DEWAN PERS
803/DP-Verifikasi/K/X/2021



MEDIA TERVERIFIKASI

BIRO: SURABAYA: YOLANDA APRILLIA PRADITHA, AMANAH NUR ASIAH, JOKO PRASETYO | **GRESIK:** ASEPTA YOGA P. (SERTIFIKASI WARTAWAN UTAMA) | **MOJOKERTO:** NUR HIDAYAH | **LAMONGAN:** L HANDI | **BLITAR:** ARIEF SUKAPUTRA | **KEDIRI:** GATOT SUNARKO | **JOMBANG :** SUTONO | **PASURUAN-PROBOLINGGO-PONOROGO :** IMAN SANTOSO | **BONDOWOSO- SITUBONDO-LUMAJANG-JEMBER-BANYUWANGI:** PURCAHYONO JULIATMOKO | **MADIUN:** WIWIET EKO PRASETYO (SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA) | **MALANG RAYA:** SANTI WAHYU SANIA (SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA), ISKANDAR Z. | **MADURA RAYA:** SAHLAN KURNIAWAN | **TRENGGALEK:** TINA W | **NGAWI:** DIMAS RIDHO SURYO BASKORO | **DKI JAKARTA:** FUAD HASSAN | **LOMBOK BARAT:** MUHAYYAN | **PALANGKA RAYA:** NOVITA MASNIARI

PENASEHAT HUKUM DR. NURIYANTO A. DAIM, SH, MH | **MARKETING COMMUNICATION** JOKO PRASETYO UTOMO, ISKANDAR ZULKARNAIN | **SEKERTARIS** FITRIYANTI SUTAN, FARADITA NUR FADHILAH
DESAIN GRAFIS PAULUS IVAN | **ALAMAT REDAKSI** JL RUNGKUT ASRI UTARA VI/26 | **TELP** 03187854491 | **PENERBIT** PT MEDIA HEBAT INSPIRASI INDONESIA | **ALAMAT PERCETAKAN** SMILE GRAFIKA JL. RAYA KALIRUNGKUT 42 SURABAYA | **TELP IKLAN** 031-87854491 | **NIB** 91205006801134 | **HARGA IKLAN** RP 25.000 MM/KOLOM

Wartawan Lentera Today dalam setiap bertugas dilengkapi dengan tanda pengenal wartawan/kartu pers yang dikeluarkan perusahaan secara sah. Nama pemegang tanda pengenal wartawan/kartu pers Lentera Today tercantum di Box Redaksi. Siapa pun yang mengaku/mengatasnamakan Lentera Today, tanpa bisa menunjukkan surat/kartu tanda pengenal atau namanya tidak tercantum dalam Kotak Redaksi, agar ditolak/ dikonfirmasi/dilaporkan ke manajemen redaksi/perusahaan atau melalui nomor telepon yang tertera di Kotak Redaksi. Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, setiap wartawan Lentera Today dilarang menerima dan/atau meminta apa pun dengan alasan apa pun.

Cita Rasa Otentik dalam Setiap Sajian Khas Bali

Pulau Bali menawarkan berbagai pengalaman wisata yang mengesankan bagi para wisatawan. Keindahan alamnya yang luar biasa mulai dari pantai berpasir putih hingga kawasan pegunungan yang rindang dan menenangkan menjadi daya tarik utama yang sulit dilupakan.

Selain itu, kekayaan budaya dan nilai-nilai spiritual di Bali turut menghadirkan pengalaman yang khas, terutama lewat berbagai upacara adat, pertunjukan tari tradisional, serta keberadaan pura yang tersebar di banyak lokasi. Kehadiran kuliner bercita rasa autentik pun semakin menyempurnakan perjalanan wisata para pengunjung. Berikut kuliner khas Bali yang bisa Anda coba dengan harga yang relatif terjangkau dan rasa yang kaya rempah.

Lawar

Lawar adalah salah satu hidangan tradisional Bali yang terbuat dari campuran sayuran, daging cincang, kelapa parut, dan aneka bumbu khas yang kaya rempah. Perpaduan bahan-bahan ini menghasilkan cita rasa yang kuat, gurih, dan sedikit pedas, menjadikan lawar sebagai pelengkap yang sering hadir dalam berbagai upacara adat maupun santapan sehari-hari.

Meskipun lawar umumnya menggunakan daging babi, tersedia pula varian lain yang menggunakan daging ayam atau bebek. Pilihan ini membuat lawar lebih inklusif dan dapat dinikmati oleh berbagai kalangan, termasuk mereka yang memiliki pantangan terhadap daging tertentu.

Sate Lilit

Ikon kuliner Bali selanjutnya yang mudah ditemui adalah sate lilit. Hidangan ini dibuat dari daging cincang—baik ayam, ikan, maupun babi yang diolah bersama bumbu khas Bali, kemudian dililitkan pada batang bambu atau serai sebagai tusuknya. Proses pelilitan ini memberi bentuk unik sekaligus aroma khas dari batang serai saat dipanggang.

Sate lilit menawarkan cita rasa yang pedas, gurih, dan kaya rempah, sangat cocok bagi Anda yang menyukai hidangan beraroma kuat dan berbumbu pekat. Tekstur dagingnya yang lembut berpadu dengan sensasi rasa yang dalam membuat sate lilit menjadi favorit di berbagai warung hingga restoran mewah di Bali.

Ikan Bakar Jimbaran

Suguhan khas ini menggunakan ikan segar yang dibakar dengan bumbu rempah khas Jimbaran. Bumbu tersebut terdiri dari campuran bawang merah, bawang putih, cabai, kunyit, jahe, dan daun jeruk, yang memberikan aroma harum dan cita rasa yang khas pada ikan bakar.

Biasanya, Ikan Bakar Jimbaran disajikan bersama sambal dan nasi putih hangat. Hidangan ini menjadi favorit di kalangan wisatawan, terutama saat disantap dalam suasana makan malam di tepi pantai yang romantis dan menenangkan, menjadikannya pengalaman kuliner yang tak terlupakan di Bali. Aroma laut yang khas, angin sepoi-sepoi, serta gemericik ombak semakin

m e n a m b a h
ke sempurnaan
m o m e n

bersantap ini, membuat siapa pun ingin kembali menikmatinya lagi di lain waktu.

Sate Babi

Berbeda dengan sate lilit yang menggunakan daging cincang, sate babi menggunakan potongan daging utuh yang ditusuk dan dibakar langsung di atas bara api. Setelah matang, sate ini disajikan dengan bumbu khas Bali yang kaya rempah, tanpa menggunakan saus kacang seperti pada umumnya.

Perpaduan rasa manis, pedas, dan gurih dari bumbu tersebut menciptakan sensasi rasa yang khas dan menggugah selera. Sate babi menjadi salah satu sajian favorit di Bali, terutama bagi para pencinta kuliner yang ingin menikmati kelezatan autentik tanpa banyak tambahan saus.

Babi Guling

Sajian paling ikonik dari Bali adalah Babi Guling, yang dikenal sebagai simbol kelezatan kuliner tradisional Pulau Dewata. Hidangan ini menggunakan daging babi utuh yang dipanggang dengan rempah khas Bali seperti kunyit, bawang putih, ketumbar, dan lengkuas bumbu yang dikenal sebagai basa genap.

Selama proses memasak, babi diputar secara perlahan (digulingkan) di atas bara api, sehingga menghasilkan daging yang matang merata, empuk, dan sarat cita rasa. Babi Guling biasanya disajikan bersama nasi putih, lawar, sayuran, serta sambal pedas, menciptakan harmoni rasa gurih, pedas, dan aromatik yang khas dan digemari banyak kalangan.

Nasi Tepeng

Nasi Tepeng adalah salah satu makanan khas Bali yang berasal dari daerah Gianyar. Hidangan ini memiliki tekstur

lembut dan sedikit basah, mirip seperti bubur, namun dengan cita rasa yang lebih kaya karena menggunakan campuran rempah-rempah khas Bali.

Biasanya, nasi tepeng disajikan dengan berbagai lauk seperti ayam goreng, telur rebus, terong, serta aneka kacang-kacangan. Di daerah asalnya, makanan ini kerap dijadikan menu sarapan.

Rujak Bulung

Jika umumnya rujak terdiri dari aneka buah-buahan segar yang dicampur dengan bumbu pedas manis, rujak bulung menawarkan sensasi berbeda. Kuliner khas Bali ini menggunakan rumput laut sebagai bahan utama, memberikan tekstur kenyal dan rasa yang unik dibanding rujak pada umumnya.

Rumput laut tersebut disiram dengan kuah pindang yang gurih dan sedikit asin, lalu ditambahkan kelapa parut serta taburan kedelai goreng untuk menambah cita rasa dan kerenyahan. Kombinasi ini menghasilkan hidangan yang menyegarkan sekaligus kaya nutrisi. (nei,ist/dya)



Sate Lilit



Lawar



Ikan Bakar Jimbaran



Nasi Tepeng



Terkena Resiprokal (dari Hal 1) ...

Kebijakan resiprokal tarif Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang dimumkan Selasa (8/7/2025) ini mengalami perubahan dari besaran resiprokal yang dimumkan pada 2 April 2025 lalu. Tercatat, pada 2 April lalu, tarif yang diterapkan pada Laos adalah 40%, sedangkan tarif terbarunya adalah 40% sehingga ada penurunan 8%. Penurunan tarif juga didapat Myanmar dari yang awalnya 44% menjadi 40%. Selain itu, penurunan cukup banyak juga diberikan pada Kamboja yang awalnya 49% menjadi 36%, sehingga ada penurunan 13%. Untuk Thailand tidak ada perubahan yaitu 36%, demikian dengan Indonesia juga tidak ada perubahan atau tetap 32%. Malaysia mengalami nasib sendidik berbeda, karena ada kenaikan 1% dari awalnya 24% menjadi 25%.

Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Palopo, Eko Budi Sutrisno, dikutip dari djpb.kemenkeu.go.id, menyebut Trump menyampaikan bahwa tarif tersebut merupakan timbal balik atau resiprokal tarif atau balasan terhadap mitra dagang Amerika Serikat yang memiliki surplus perdagangan. Sebab, Amerika Serikat justru mengalami defisit neraca perdagangan dengan mitra dagang tersebut.

Dalam konteks Indonesia, lanjut Eko Budi, Trump mengklaim tarif atau hambatan yang dikenakan Indonesia terhadap produk Amerika mencapai 64%. Bahkan, bisa saja Trump menerapkan tarif balasan serupa, akan tetapi Trump memilih memangkas besarnya hanya 32%.

"Tarif impor resiprokal yang diterapkan Trump akan memberikan dampak terhadap ekspor Indonesia ke Amerika. Tarif sebesar 32 persen bakal membuat produk Indonesia yang masuk pasar Amerika lebih mahal," katanya.

Dengan demikian, maka kemungkinan yang terjadi adalah daya saing produk Indonesia bisa kalah oleh produk lain. Akibatnya, importir atau pembeli dari Amerika bisa mengurangi pembelian produk Indonesia ataupun beralih ke pemasok lain.

"Amerika Serikat merupakan salah satu tujuan ekspor terbesar. Tahun 2024, ekspor ke Amerika mencapai 9,7 persen dari total ekspor Indonesia. Amerika hanya kalah dengan Cina yang memiliki porsi 25,66 persen," paparnya.

Dia menambahkan bahwa Data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan Negeri Paman Sam merupakan negara tujuan utama ekspor nonmigas terbesar kedua, setelah Cina. Nilai ekspor nonmigas ke Amerika Serikat pada Februari 2025 mencapai US\$2,35 miliar, sedangkan Cina sebesar US\$4,29 miliar.

Selama ini bea impor untuk Indonesia ke Amerika hanya 6-10%. Sedangkan, produk ekspor utama Indonesia ke Amerika, antara lain,

adalah elektronik, tekstil, alas kaki, palm oil, karet, furnitur, udang, serta produk-produk perikanan laut.

Dengan adanya resiprokal tarif Trump yang diterapkan untuk Indonesia ini maka mengakibatkan industri tekstil Indonesia bisa semakin terpukul. Dampaknya bisa terjadi pada para buruh atau pekerja di pabrik tekstil. Sebelumnya, Kementerian Ketenagakerjaan mencatat lebih dari 24 ribu buruh tekstil terkena pemutusan hubungan kerja sepanjang 2024.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies, Bhima Yudhistira, mengatakan bahwa peneraan tarif 32% ini akan sangat berdampak buruk terhadap ekonomi Indonesia. Berdasarkan perhitungannya, tarif 32% ini akan mengakibatkan turunnya nilai ekspor Indonesia hingga Rp 105,9 triliun. Kemudian turunnya output ekonomi nasional sebesar Rp 164 triliun.

Sektor ekspor utama Indonesia yang bakal terhantap adalah produk tekstil, pakaian, dan alas kaki. Ia mencatat ekspor pakaian jadi ke Amerika Serikat mencapai 61,4% dan alas kaki sebesar 33,8%.

"Begitu kena tarif yang lebih tinggi, brand itu akan menurunkan jumlah order atau pemesanan ke pabrik Indonesia," katanya.

Penurunan permintaan berarti tekanan tambahan bagi industri padat karya. Kondisi ini berisiko menimbulkan gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang lebih besar.

"Jadi ini cukup signifikan dampaknya terhadap ekonomi Indonesia, karena beberapa sektor padat karya masih bergantung pada Amerika Serikat. Alas kaki pakaian jadi dominan ke Amerika," katanya.

Bhima menambahkan, dampak langsung yang akan dirasakan masyarakat ialah menurunnya pendapatan tenaga kerja di Indonesia. Ia menyebut penurunan pendapatan tenaga kerja mencapai Rp 52 triliun.

Kemudian, ia menyebut bahwa tarif 32% ini akan mengakibatkan terjadinya penurunan serapan tenaga kerja hingga mencapai 1,2 juta orang. Hal ini karena tarif ini sangat berdampak terhadap industri padat karya RI.

"Itu dampak langsungnya bagi masyarakat soal pengangguran dan pendapatan tenaga kerja turun tajam," katanya.

Sementara itu, lanjutnya, pasar dalam negeri belum kompetitif untuk menggantikan ekspor. Dia mengatakan bahwa apalagi kemungkinan ada regulasi yang dianggap membuka peluang impor saat ini, diperkirakan pasar dalam negeri akan dibanjiri produk impor asal Cina, Vietnam, dan Kamboja. Ketiga negara tersebut bakal berusaha mencari pasar alternatif yaitu Indonesia.

Efek turunan tarif resiprokal 32% juga akan terasa di pasar keuangan. Rupiah bisa tertekan karena efek

impor inflation, yaitu situasi saat harga barang impor menjadi lebih mahal. Kondisi ini bisa menekan daya beli lebih lanjut.

Dengan kondisi tersebut, Bhima mendorong pemerintah untuk segera mengambil langkah konkret guna merespons kebijakan tarif tersebut dengan melakukan diversifikasi tujuan ekspor ke sejumlah negara lain.

"Salah satunya ke Intra ASEAN, kemudian lebih penetrasi lagi ke negara BRICS. Atau ke daerah lain misalnya di Timur Tengah, kemudian Amerika Latin, Asia Selatan juga. Jadi mau nggak mau memang harus terus melakukan perluasan pasar ekspor," katanya.

Senada, Direktur Eksekutif Center for Strategic and International Studies (CSIS), Yose Rizal Damuri, mengatakan bahwa tarif ini akan berdampak terhadap menurunnya ekspor Indonesia ke AS. Terlebih ekspor Indonesia ke AS lebih banyak padat karya yang bakal menimbulkan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di sektor tersebut.

"Tentunya akan ada pressure, akan ada challenge juga terhadap industri padat karya ini. Termasuk juga kemungkinan pemutusan hubungan kerja seperti misalnya industri tekstil atau garment saja itu ada sekitar 1 juta orang yang terlibat di dalamnya. Dan itu kalau misalnya ekspor yang ke Amerika Serikat akan turun tentunya akan berdampak terhadap employment di sektor ini," katanya saat dihubungi detikcom.

Pernyataan serupa disampaikan Ketua umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Shinta W Kamdani, yang mengatakan jika tarif 32% ini benar-benar diberlakukan penuh, sektor padat karya dengan ekspor besar ke AS, seperti Tekstil dan Produk Tekstil (TPT), alas kaki, furnitur, dan mainan, akan menghadapi tekanan lebih berat.

"Jika kebijakan tarif tinggi ini benar-benar diberlakukan secara penuh, tekanan terhadap sektor industri padat karya akan semakin besar," ujar Shinta dalam keterangan resminya dikutip tirto.id, Rabu (8/7/2025).

Dia menjelaskan bahwa tekanan ini muncul di tengah tren pelemahan indeks manufaktur (PMI), kenaikan biaya produksi, dan perlambatan permintaan global.

Meski ketergantungan ekspor ke AS relatif moderat sekitar 10 persen dari total ekspor, Apindo memperingatkan risiko nyata berupa penurunan permintaan, masuknya barang murah atau ilegal, dan tingginya biaya usaha.

Oleh karenanya, menurut Shinta, keberhasilan mengatasi tantangan ini akan sangat bergantung pada diplomasi ekonomi yang solid, terukur, dan berorientasi kepentingan jangka panjang industri nasional.

Apindo mengusulkan beberapa langkah strategis yaitu mendorong skenario saling menguntungkan dengan meningkatkan impor komoditas strategis AS (kapas, jagung, produk susu, kedelai, minyak mentah).

Kemudian, memperkuat diversifikasi pasar ke negara non-tradisional serta meningkatkan efisiensi rantai pasok. Selain itu juga dengan melaksanakan percepatan deregulasi dan kemudahan berusaha di dalam negeri serta penguatan instrumen pengamanan perdagangan.

Shinta menekankan momentum ini sebagai peluang untuk mempercepat reformasi struktural melalui pendekatan deregulasi lintas sektor secara konsisten. Apindo siap terlibat aktif dalam satuan tugas pemerintah untuk membenahi hambatan usaha.

"Dengan langkah diplomasi yang kuat disertai dengan pembenahan iklim berusaha di dalam negeri, kami optimis bahwa Indonesia dapat melalui tantangan ini sesuai harapan," pungkashinta.

Terkait dengan kebijakan Trump ini, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto akan terbang langsung ke Amerika Serikat (AS). Hal ini disampaikan oleh Juru Bicara Kemenko Perekonomian, Haryo Limanseto.

Dia mengatakan, tindakan Airlangga tersebut adalah bagian dari upaya menanggapi kebijakan tarif 32% yang dikenakan Presiden Donald Trump terhadap produk asal Indonesia. "Menko Airlangga dijadwalkan akan mengadakan pertemuan dengan perwakilan Pemerintah AS untuk mendiskusikan segera keputusan tarif Presiden AS Donald Trump untuk Indonesia yang baru saja keluar," kata Haryo, Selasa (8/7/2025).

Menurutnya, Indonesia melihat masih ruang untuk merespons sebagaimana yang disampaikan oleh Pemerintah AS. "Pemerintah Indonesia akan mengoptimalkan kesempatan yang tersedia demi menjaga kepentingan nasional ke depan," tegas Haryo.

Sementara itu, Menteri Keuangan (Menkeu) RI, Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa pemerintah akan merespons kebijakan Trump tersebut melalui koordinasi lintas kementerian. Ia juga mengatakan bahwa Tim Negosiasi RI bakal tiba di AS pada Selasa (8/7/2025), untuk melanjutkan proses perundingan dengan perwakilan Pemerintah AS.

"Nanti Pak Menko (Airlangga Hartarto) saja. Nanti saja hari Selasa akan kita respons," ujar Sri Mulyani saat ditemui usai menghadiri Rapat Paripurna DPR RI, di Jakarta, Selasa (8/7/2025).

Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu juga belum memberikan keterangan rinci soal dampak kebijakan tarif tersebut terhadap penerimaan negara, mengingat penerapannya belum efektif.

"Belum efektif, belum tahu nanti. Saya belum kasih komen, belum dapat final seperti apa," katanya lagi.

Meski demikian, ia mengamini bahwa proses negosiasi masih akan terus berlanjut. "Saya kira iya (lanjut negosiasi)," ujar Anggito. (rls/ant/ist/lut)



Dikeluhkan Warga, DPRD Jatim Evaluasi Mahalnya Harga Seragam Sekolah

SURABAYA – Polemik mahalunya harga seragam di sejumlah SMA dan SMK negeri di Jawa Timur kembali mencaut. DPRD Jatim akan melakukan evaluasi dan meminta Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim segera turun tangan.

Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Deni Wicaksono, menegaskan praktik kewajiban pembelian seragam dari sekolah dengan harga tinggi harus segera dihentikan. Ia mengingatkan, lembaga pendidikan negeri seharusnya menjadi tempat yang menjamin akses pendidikan murah dan terjangkau bagi semua kalangan, bukan justru menjadi beban baru bagi keluarga murid.

“Kalau benar ada kewajiban beli seragam dari sekolah dengan harga mahal, ini harus segera dievaluasi. Tidak boleh ada paksaan apalagi sampai memberatkan wali murid,” tegas politisi muda dari PDI Perjuangan tersebut diujung Selasa (8/7/2025).

Diketahui, sejumlah orang tua murid di beberapa wilayah Jatim mengeluhkan harga seragam yang dinilai tidak masuk akal. Bahkan dinilai cenderung memaksa wali murid untuk membeli dari penyedia yang direkomendasikan sekolah.

Deni meminta agar tidak ada mekanisme pembelian seragam yang terkoordinir secara terselubung. Baik melalui sekolah, komite, koperasi sekolah, maupun pihak ketiga.

Menurutnya, praktik semacam ini mencederai semangat pemerataan akses pendidikan dan bisa membuka ruang penyalahgunaan kewenangan.

“Orang tua harus diberi ruang untuk beli seragam di luar, selama



Wakil Ketua DPRD Jatim, Deni Wicaksono. (dok.pri)

sesuai warna dan model. Jangan sampai wali murid dipaksa membeli dari sekolah saja,” lanjutnya.

Lebih lanjut, Deni menjelaskan persoalan mahalunya seragam sekolah ini sebenarnya muncul karena belum adanya regulasi yang mengatur batas atas harga seragam, baik di tingkat provinsi maupun nasional. Sejumlah daerah di Indonesia sudah mulai menerapkan Peraturan Gubernur (Pergub) atau Peraturan Wali Kota (Perwali) yang mengatur harga maksimal seragam. Namun hingga kini, Jawa Timur belum memiliki kebijakan yang serupa.

“Persoalan ini muncul karena tidak adanya regulasi harga maksimal seragam di level provinsi atau nasional. Beberapa daerah memang sudah menerapkan pergub atau perwali soal harga seragam, namun di Jawa Timur belum ada ketentuan serupa yang mengikat semua sekolah,” tegas Deni.

Ia juga mengingatkan, sejak akhir 2023, moratorium penjualan seragam oleh sekolah telah dicabut oleh Gubernur, namun bukan berarti sekolah dapat dengan bebas menentukan harga tanpa batas kewajaran.

“Moratorium penjualan seragam di sekolah sudah dicabut Gubernur sejak akhir 2023. Tapi bukan berarti sekolah bebas menentukan harga seenaknya,” ujarnya.

Senada, Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur, Sri Untari Bisowarno, juga menyampaikan

keprihatinannya atas praktik penjualan seragam yang terkoordinir dari sekolah. Menurutnya, sudah semestinya orang tua diberi kebebasan penuh untuk mengadakan seragam sendiri, selama sesuai dengan contoh model dan warna yang ditetapkan sekolah.

“Seharusnya biarkan orang tua dan siswa mengadakan seragam sendiri, jangan ada tekanan yang terkoordinir dari sekolah, entah lewat sekolah, komite, maupun koperasi sekolah,” tegasnya.

Sebagai Ketua Komisi E yang membidangi pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan rakyat, Sri Untari juga menekankan kebijakan pengadaaan seragam yang lebih fleksibel tidak hanya berpihak pada rakyat, tetapi juga memberi manfaat ekonomi bagi pelaku usaha mikro seperti penjahit lokal dan toko kain di lingkungan sekitar.

“Sekolah cukup memberikan contoh model, biar orang tua siswa dan anak mengadakan sendiri-sendiri.

Yang penting modelnya sama, kainnya biar beli sendiri dan menjahit sendiri, para tukang jahit juga biar dapat rezeki,” ucapnya.

Sri Untari menambahkan hak dasar warga negara, dan negara harus hadir secara nyata dalam meringankan beban pendidikan. Dengan memberikan keleluasaan bagi orang tua, maka prinsip keadilan sosial dalam pendidikan bisa lebih tercapai.

“Komisi E sejak awal berkomitmen

untuk menjaga akses pendidikan yang terjangkau dan adil. Ketika urusan seragam justru menjadi momok baru bagi orang tua, itu tanda ada yang salah dalam implementasi kebijakan di lapangan,” tegas politisi perempuan senior ini.

Dindik diminta Turunkan Tim Pengawas

Sementara itu, anggota Komisi E DPRD Jawa Timur lainnya, Rasiyo, juga menyuarakan sikap serupa. Menurutnya, jika tidak ditangani secara serius, masalah harga seragam ini akan terus menjadi beban bagi masyarakat, terutama keluarga dari kalangan menengah ke bawah.

“Kalau tidak ditangani serius, masalah mahalunya seragam ini bisa terus jadi beban warga. Padahal sekolah negeri seharusnya jadi solusi, bukan justru menambah masalah,” ujar Rasiyo.

Sebagai mantan birokrat yang pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan Jatim, Rasiyo memahami betul dinamika di lapangan. Ia menyebut salah satu tugas sekolah negeri adalah menjamin pendidikan murah dan terjangkau. Oleh karena itu, praktik-praktik yang berpotensi menjadi pungutan terselubung harus dihentikan.

Rasiyo pun mendesak Dinas Pendidikan Jatim untuk segera menurunkan tim pengawasan ke lapangan dan meminta klarifikasi dari sekolah-sekolah yang dilaporkan melakukan pemaksaan pembelian seragam. (adv.pra/lut)



Ketua Komisi E DPRD Jatim, Dr. Sri Untari Bisowarno



Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Rasiyo